

**IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI
DESA RAWANG BINJAI KECAMATAN PANGEAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat skripsi
Pada program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi*



Oleh:

PUTRI ANJELI
NPM.220411066

**PROGRAM STUDI ADMINITRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 21
Bulan : Mei
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA


EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

SEKRETARIS


SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906

1. DESRIADI, S.Sos., M.Si

(Pembimbing I) 

2. SARJAN M, S.Sos., M.Si

(Anggota Penguji I) 

3. RISVANDI, S.Pd.L., M.Si

(Anggota Penguji II) 


Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN
PANGAN DI DESA RAWANG BINJAI
KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI.
NAMA : PUTRI ANJELI
NPM : 220411066
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

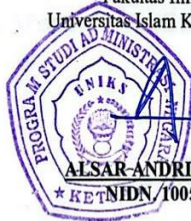
PEMBIMBING I


DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302

PEMBIMBING II


SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



ALSAR-ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama :PUTRI ANJELI
NPM :220411066
Universitas : Islam Kuantan Singingi
Fakultas : Ilmu Sosial
Program studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain dengan mencantumkan sumber orang lain dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, April 2026



PUTRIANJELI
NPM.220411066

MOTTO

“Selesaikan apa yang sudah kamu mulai,lewati saja badainya jangan ubah tujuannya”

Pendidikan memang menentukan cara seseorang memandang sesuatu dan merespon keadaan,selagi ada kesempatan,didik dirimu sebaik mungkin.Agar kamu paham kursi tempat dudukmu.Tapi jangan lupa mengisi nurani.Sebab yang berpendidikan tinggi tanpa nurani,sering menyalahgunakan kesempatan di kursi yang mereka duduki.

PERSEMBAHAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kedua orang tua saya tercinta Bapak Ali Muhammad dan Ibu Andam Dewi yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimah kasih sudah mengantarkan saya sampai di tempat ini. saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk bapak dan ibu.

Diri saya sendiri Putri Anjeli karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Sahabat dan teman teman saya yang telah menemani dalam suka maupun duka. Terimah kasih atas segala waktu, usaha dan dukungan yang telah diberikan.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi wawasan dan manfaat untuk orang lain. **Aamiin.**

Billahi fi Sabili al-haq, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis

**PUTRI ANJELI
NPM. 220411066**

KATA PENGANTAR

رومكيدعم لاسلامه تا كربو الله اة

Sebuah ucapan rasa syukur “Alhamdulillah” penulis ucapkan kepada Allah SWT yang memberikan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya kepada hambanya untuk melihat dan menyaksikan kebesaran serta keagungan-Nya. terutama untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan petunjuk dan keredhoan-Nya yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Untukmu sang pengemban amanat yang tak pernah berbuat khianat dan pembawa risalah yang takut akan berbuat salah yaitu Rasulullah SAW yang akan tetap selalu penulis persembahkan sebuah doa keselamatan untuknya dan keluarga serta para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sebagai *rijal ad-da'wah* yang telah menyelamatkan umat manusia dari lembah kehancuran menuju kehidupan yang berperadapan (*yukhrijuhum min azh-zhulumat ila an-nur*) mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang terpilih dan layak untuk mendapatkan syafa'at dari-Nya Amin.

Sebuah penelitian dengan judul : **“Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”**, yang penulis angkat merupakan kajian dan telaah mencoba menemukan sebuah urgensi implementasi dari suatu agenda kebijakan, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi telah dilaksanakan di Desa Rawang Binjai Kcamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Proses perancangan, penyusunan, pembuatan, serta penyelesaian penelitian ini penulis tidak menafikan bahwa banyak pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Baik itu sifatnya dukungan materil, moril maupun dukungan spirituil berupa data, fasilitas, semangat dan motivasi, masukan, kritikan dan saran serta doa yang begitu besar terhadap penulis. Sehingga penulis mampu melewati berbagai halangan dan rintangan dalam penulisan penelitian ini.

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah terlibat baik secara

langsung maupun tidak langsung dan telah membantu terbentuknya skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Ibu Dr. H. Ikrima Mailani, Spd.I., M.Pd.I sebagai Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai mata kuliah serta memberikan kemudahan fasilitas dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial.
3. Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat kemudahan dan pencerahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah mendidik penulis, membimbing, memberikan kritikan, masukan dan saran serta motivasi kepada penulis sehingga selesainya penelitian ini.
5. Bapak Sahri Muharam, S.Sos., M.Si, selaku pembimbing II penulis yang telah mendidik, membimbing, dan mengarahkan penulis.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu seluruh Dosen/Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik, memberikan pengetahuan kepada penulis.
7. Kedua orang tua tercinta,yang telah mendidik anak anaknya serta berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan anak nya dalam menempuh pendidikan sampai pada tahap Sarjana S1
8. Untukmu sahabat-sahabat karibku yang senantiasa memberikan motivasi, support, semangat, nasehat serta perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar untuk penulis. Hanya doa yang bisa kupanjatkan kepada Sang Maha Pencipta agar kita dipertemukan di Syurga-Nya serta senantiasa sukses di dunia dan juga sukses di akhirat.

9. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu pemerintahan desa dan masyarakat Desa Rawang Binjai, Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dihaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap dukungan, serta data yang telah bapak-bapak dan ibu-ibu berikan kepada penulis.

Meskipun penulis telah berusaha keras dalam penulisan penelitian ini, namun penulis masih merasa bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak guna untuk perbaikan menuju kearah kesempurnaan menuju penelitian selanjutnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga atas segala apa yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi sebuah amal kebajikan dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T. Amin Ya Robbal 'Alamin.

وروم كيل عم لاسلامه ت اكربو الله اة

Teluk Kuantan, April 2026

Penulis

**PUTRI ANJELI
NPM. 220411066**

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN.....	i
TANDA PERSETUJUAN.....	ii
TANDA ORINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
KATA PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.1 Secara Teoritis	8
1.4.2 Secara Praktis.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1Teori Administrasi Negara	9
2.1.2 Teori Kebijakan Publik.....	13
2.1.2.1 Formulasi kebijakan.....	16

2.1.2.2 Implementasi kebijakan	18
2.1.2.3 Evaluasi Kebijakan	26
2.1.3 Teori Ketahanan Pangan	30
2.1.3.1 Kebijakan Ketahanan Pangan.....	36
2.1.3.2 Ketahanan Pangan Di Kabupaten Kuansing	40
2.1.3.3 ketahanan Pangan Di Desa Rawang Binjai	42
2.2 Kerangka Pemikiran	45
2.3 Hipotesis Penelitian	45
2.4 Operasional Variabel	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Jenis Penelitian	47
3.2 Informan	47
3.3 Sumber Data.....	48
3.4 Fokus Penelitian	48
3.5 Lokasi Penelitian	49
3.6 Teknik Pengumpulan Data	49
3.7 Meetode Analisis data	50
3.8 Jadwal Penelitian	54
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	55
4.1 Sejarah Singkat Desa Rawang Binjai	55
4.2 Keadaan Demografi Desa Rawang Binjai	56

4.3	Visi Dan Misi Desa Rawang Binjai	58
4.4	Struktur Organisasi.....	59
4.5	Fasilitas Umum Desa Rawang Binjai.....	60
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		63
5.1	Identitas Responden.....	63
5.2	Hasil Dan Pembahasan Implementasi Program Ketahanan pangan di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean KabupatenKuantan Singingi	
5.3	Analisis hasil Pembahasan Implementasi Program ketahanan pangan di Desa Rawang Binjai kecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi	
BAB VI PENUTUP		97
6.1	Kesimpulan	97
6.2	Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....		99

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Indikator Implementasi kebijakan Publik	44
Tabel 2.4 Konsep operasional	46
Tabel 3.1 Tabel Informan.....	48
Tabel 3.7.4 Jadwal Penelitian	54
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Dan Jenis kelamin	57
Tabel 4.2 Komposisi Penduduk.....	58
Tabl 4.3 Struktur Organisasi	60
Tabel 5.1 Identitas Responden	63
Tabel 5.2 Responden Berdasarkan Umur.....	64
Tabel 5.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambar Jagung Pipil.....	5
Gambar 1.2 Gambar Tanaman Cabai.....	6
Gambar 2.1 Gambar kerangka Pemikiran	45
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Wawancara

Dokumentasi

Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DESA
RAWANG BINJAI KECAMATAN PANGEAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

Oleh :
PUTRI ANJELI
220411066

Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Program ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa ditujukan untuk memperkuat ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat desa guna mendukung peningkatan kesejahteraan dan kemandirian pangan. Namun implementasinya di lapangan masih menemui sejumlah kendala, seperti rendahnya partisipasi dari masyarakat, perencanaan kurang matang, kemampuan organisasi tidak melakukan perencanaan dengan matang, SDM terbatas dan rendahnya pengetahuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program ketahanan pangan di Desa Rawang Binjai Kurang Terimplementasi, dan belum berjalan dengan optimal, terutama dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan program. Oleh karena itu diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program ketahanan pangan guna mendorong terciptanya kemandirian dan ketahanan pangan yang lebih baik di tingkat desa.

Kata Kunci : Implementasi program ketahanan Pangan

ABSTRACT
**IMPLEMENTATION OF THE FOOD SECURITY PROGRAM IN RAWANG
BINJAI VILLAGE, PANGEAN DISTRICT
KUANTAN SINGINGI REGENCY.**

By :
PUTRI ANJELI
220411066

This study aims to analyze the implementation of the Food Security Program in Rawang Binjai Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency. The food security program implemented by the village government aims to strengthen the availability, affordability, and utilization of food for the village community to support improved welfare and food self-sufficiency. However, its implementation in the field still encounters several obstacles, such as low community participation due to the village government's lack of understanding.

This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the food security program in Rawang Binjai Village has been implemented, but has not run optimally, especially in aspects of planning, implementation, and program sustainability. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of village officials and increase community participation in every stage of the food security program implementation to encourage the creation of independence and better food security at the village level.

Keywords: Implementation of the Food Security Program

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan komoditas strategis dan selalu menjadi kebutuhan utama masyarakat. Sektor pertanian memainkan peran penting dalam menyediakan pangan nasional dan memberikan kontribusi yang utama dalam memperkuat ketahanan pangan yang diarahkan pada kemandirian berusaha. Dengan demikian, ketersediaan pangan harus selalu terjamin kecukupannya. Mampu melakukan inovasi untuk meningkatkan produktivitas lahan yang dimiliki adalah salah satu bentuk kemandirian usaha pertanian, menurut Harriyadi (2009). Jadi para petani harus mampu mengurangi ketergantungan mereka dan mencari cara baru untuk mendapatkan sumber tambahan. Oleh karena itu, diharapkan para petani dapat merancang lahan pertanian mereka sehingga lebih efisien dan memiliki daya guna yang tinggi. Dengan melakukan usaha mina padi, dapat memberikan manfaat tambahan dan kontribusi pendapatan tambahan bagi masyarakat (Sularmo dan Jauhari 2014)

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 mencakup beberapa masalah global, termasuk mengakhiri kelaparan, mencapai peningkatan ketahanan pangan dan nutrisi, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Pada tahun 2018, Badan Ketahanan Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah ketika setiap orang di negara tersebut memiliki pasokan pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun kualitasnya, yang aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau sehingga mereka dapat hidup dengan sehat, aktif, dan

produktif secara berkelanjutan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah indeks komposit yang menilai situasi ketahanan pangan berdasarkan tiga faktor: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Laporan tahun 2018 tentang Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan di Indonesia masih lemah, dengan 81 dari 416 kabupaten dan 7 kota menerima skor IKP yang rendah (Khalista & Risni, 2019).

Saat ini, tampaknya kemungkinan untuk memasukkan produksi pangan ke dalam kebijakan ketahanan pangan Indonesia tidak dimanfaatkan dengan baik. Terutama dalam hal tanaman pangan, peran sektor pertanian dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tampaknya tidak signifikan; di tahun 2020, pertanian hanya mampu mencatat 12,84% dari PDB secara keseluruhan (BPS, 2020). Namun, sektor pertanian masih menjadi sektor terbesar yang menyerap tenaga kerja sebesar 27,33% (BPS, 2020)

Salah satu prioritas dalam pelaksanaan ketahanan pangan desa adalah kapasitas masyarakat desa untuk mengelola sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, air, dan air untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kebijakan ketahanan pangan desa mengacu pada upaya mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan, khususnya desa yang tidak lagi miskin, kelaparan, sehat, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tujuan Desa, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup, memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan infrastruktur dan fasilitas desa, dan mendorong perekonomian lokal. Tujuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa, membantu menghentikan peningkatan kemiskinan, dan secara bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang APBN menegaskan bahwa setidaknya 20% dari Dana Desa harus dialokasikan untuk inisiatif ketahanan pangan dan peternakan (akademidesa.id 2022).

Kementerian pertanian bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan. Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar dan terluas di dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, ketahanan pangan didefinisikan sebagai "kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun kualitasnya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan produksi pangan, distribusi yang lancar, dan konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi adalah tanda bahwa wilayah tersebut berhasil dalam pembangunan ketahanan pangan (Rio dkk., 2023).

Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program mendorong desa untuk berperan aktif dalam penguatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal. salah satu komoditas unggulan yang memiliki nilai strategis dan ekonomis adalah jagung pipil, karena mudah dibudidayakan, memiliki pasar yang luas serta dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan, pakan ternak dan industri. Sejalan dengan kebijakan pemerintah tersebut desa rawang binjai memiliki peluang besar untuk mengembangkan program ketahanan pangan jagung pipil dengan memanfaatkan

lahan dan sumber daya masyarakat. Pelaksanaanya dikelola oleh BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa .

Pelaksanaan program ketahanan pangan jagung pipil dilakukan melalui tahapan yang terencana, meliputi pengolahan lahan, penyediaan benih unggul, pemupukan, perawatan tanaman hingga proses panen dan pasca panen. Kegiatan ini melibatkan masyarakat desa khususnya kelompok tani sehingga bisa membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan masyarakat setempat.

Ketahanan pangan Desa Rawang binjai Adalah Peningkatan Budidaya Jagung pipil dan cabai dengan Luas Lahan tanaman jagung 1 Ha yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya jagung pipil, sesuai musyawarah dana sementara yang dikucurkan sebesar Rp.94.000.000 untuk kebutuhan pengelolaan lahan, pupuk, dan tenaga kerja. Meskipun modal yang dikeluarkan cukup besar, sistem pengelolaan jagung tidak menggunakan pola bagi hasil antara Bumdes dan masyarakat karena tanaman jagung Pipil lebih relatif mudah dalam hal perawatan dan tidak memerlukan perawatan intensif setiap hari serta siklus masa tanam yang lebih panjang dan stabil. Hasil panen jagung pipil dari program ketahanan pangan ini selanjutnya akan dikelola dan dipasarkan oleh bumdes, Dimana keuntungan yang diperoleh akan dimasukkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD Desa). Program Ketahanan pangan ini menggunakan dana sebesar Rp. 94.000.000. Setelah masa panen, hasil yang diperoleh hanya sebanyak 400 kilogram jagung pipil dengan total pendapatan sebesar Rp.6.000.000 dari

perhitungan tersebut terlihat bahwa dana yang dikeluarkan jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima.



Gambar 1.1 Gambar Jagung Pipil di desa Rawang Binjai

Berbeda dengan tanaman jagung, Dari tim bumdes juga menanam Tanaman Cabai dan yang mengelolah hanya 5 orang Dari Tim Bumdes, komoditas cabai dikelolah dengan pola bagi hasil antara Tim bumdes dan akan

dimasukkan juga untuk PAD .Hal ini terjadi karena tanaman cabai memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi membutuhkan perawatan harian seperti penyiraman,pemupukan rutin,dan serta tanaman cabai memiliki resiko kegagalan yang lebih besar dan sembari menunggu tanaman jagung panen lahan kosong pun dimanfaatkan Oleh BUMDes untuk menanam cabai.Oleh sebab itu pemerintah desa mengalokasikan modal sementara sebesar 20.000.000 dengan luas lahan 4.000 meter dengan jumlah tanaman 4.500 batang.



Gambar 1.2 Tanaman cabai Di Desa Rawang Binjai

Berdasarkan pengamatan penelitian ditemukan beberapa masalah mengenai program ketahanan pangan di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

1. Rendahnya Partisipasi dari masyarakat dalam pengembangan ketahanan Pangan ditandai oleh Dari jumlah Penduduk Desa Rawang Binjai berjumlah 525 orang yang berpartisipasi hanya

30 orang dalam pelaksanaan program ketahanan pangan. Angka ini menunjukkan bahwa kurang dari 6% masyarakat yang berpartisipasi.

2. Perencanaan program yang belum dilakukan secara matang, dilihat dari kurangnya kajian terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat sebelum program dilaksanakan, sehingga jenis tanaman yang dipilih belum sepenuhnya sesuai dengan minat dan kemampuan masyarakat.
3. Kemampuan organisasi pelaksanaan belum optimal, terutama dalam aspek perencanaan program. Perencanaan yang dilakukan belum disusun secara matang dan menyeluruh.
4. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai budidaya jagung pipil juga masih rendah, sebagian masyarakat belum memahami teknik penanaman, perawatan, pengendalian hama, hingga pemanfaatan hasil panen lebih baik.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi ketahanan pangan di Desa Rawang Binjai. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat Desa Rawang Binjai.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut di desa yang berlokasi di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singing dengan judul “**Implementasi Program Ketahanan**

Pangan Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : **“Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”.**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk dapat dijadikan sebagai suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada Implementasi Ketahanan Pangan Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber data bagi pihak pemerintah dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Administrasi Publik Atau Negara

Secara etimologi administrasi berasal dari bahasa latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “*ad*” dan “*ministrate*” yang berarti “*to serve*” yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani dan atau memenuhi. kemudian Dimock (dalam Pasolong, Harbani. 2017:2) mengatakan administrasi berasal dari kata “*ad*” dan “*minister*” yang berarti juga “*to serve*”. jadi dapat dipahami bahwa yang dimaksud administrasi adalah suatu proses pelayanan atau pengaturan.

Herbert A. Simon (dalam Pasolong Harbani. 2017:3) mendefenisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Leonard D. White (dalam Pasolong, Harbani. 2017:3) mendefenisikan administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Dimock (dalam Pasolong, Harbani. 2017:3) mengatakan bahwa administrasi adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek-aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen.

Kata publik berasal dari bahasa inggris “*public*” yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat. Syafi’ie (dalam Pasolong, Harbani. 2017:7) mengatakan bahwa publik adalah sejumlah manusia

yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

H. George Frederikson (dalam Pasolong, Harbani. 2017:7) menjelaskan konsep publik dalam lima perspektif, yaitu (1) publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat, (2) publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri, (3) publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik diwakili melalui suara, (4) publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang sedikit besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya juga dianggap sebagai publik (5) publik sebagai warga Negara, yaitu warga Negara dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting.

Konsep administrasi publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi publik tersebut sudah ada sejak dari dulu, hanya para pakar mengganti istilah Administrasi Publik menjadi Administrasi Negara.

Chandler dan Plano (dalam Pasolong, Harbani. 2017:8) mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan

dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and Science*) yang ditujukan untuk mengatur "*public affairs*" dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan.. Administrasi sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Felix A. Nigro dan L.Loyd G. Nigro (dalam Pasolong, Harbani. 2017:9) mendefinisikan administrasi publik adalah (1) Suatu kerjasama dalam lingkungan pemerintahan, (2) Meliputi tiga cabang pemerintahan : Eksekutif, Legislatif, dan serta hubungan di antara mereka, (3) Mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karena merupakan sebagian dari proses politik, (4) Berkaitan erat dengan berbagai macam kelompok Swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat, (5) Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat di simpulkan bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih ,kelompok atau lembaga untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisiensi dan efektif.

Gerald E. Caiden menyatakan bahwa administrasi Negara meliputi setiap bidang dan aktivitas yang menjadi sasaran kebijakan pemerintah ; termasuk proses formal kegiatan-kegiatan DPR ,fungsi-fungsi yang berlaku dalam lingkungan pengadilan dan kegiatan dari lembaga-lembaga pemerintah.

Gerald Caiden mengungkapkan bahwa administrasi Negara merupakan fungsi dari pembuatan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran, penggalangan kerjasama dengan DPR dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh dukungan rakyat dan dana bagi program pemerintah, penetapan dan jika perlu perubahan organisasi, pengerahan dan pengawasan pegawai, kepemimpinan, komunikasi, pengendalian dan lain-lain fungsi yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga pemerintahan lainnya (Juharni, 2015).

Fayol (dalam Pasolong, Harbani. 2017:15) mengemukakan prinsip-prinsip administrasi sebanyak 14 yaitu sebagai berikut: (1) Pembagian pekerjaan, (2) Wewenang, (3) Disiplin, (4) Kesatuan, (5) Kesatuan Arah, (6) Mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, (7) Pemberian upah, (8) Pemusatan, (9) Rentang Kendali, (10) Tata Tertib, (11) Keadilan, (12) Stabilitas pada Jabatan Personal, (13) Inisiatif, (14) Rasa Persatuan.

Herbert Simon (dalam Pasolong, Harbani. 2017:16) membagi empat prinsip-prinsip administrasi yang lebih umum: (1) Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui suatu spesialisasi tugas di kalangan kelompok, (2) Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dengan hirarki yang pasti (3) Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sector di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil, (4) efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui pengelompokan pekerjaan. untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan: tujuan, Proses, Langgan, tempat.

Ruang lingkup administrasi publik menurut Nicholas Henry (dalam Pasolong, Harbani.2017:22) yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas selain perkembangan ilmu administrasi Publik itu sendiri yaitu:

- 1) Organisasi publik, berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
- 2) Manajemen publik , berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia.
- 3) Implementasi ,berhubungan dengan pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

2.1.2 Teori Kebijakan Publik

kebijakan merupakan suatu proses yang melalui sisi langkah pelaksanaan serta evaluasi sehingga menekankan dengan usulan dan definisi terkait kebijakan lebih optimal apabila arah tindakan selaras dengan adanya usulan tindakan.. James Anderson Berpendapat bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi permasalahan (Ravyansah 2022).

Melalui Laswell dan Kaplan dalam Abidin menyatakan bahwa kebijakan dalam pemerintah sebagai sarana untuk mencapai tujuan serta program yang memproyeksikan terkait dengan tujuan, nilai, serta praktik (*a projected program of goals, values, and practice*). Bagi Friedrich yaitu suatu kebijakan yang paling

pokok terdapat tujuan (*goals*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*) (Ravyansah 2022).

Kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (aktor) untuk mengatasi suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu dan praktik Administrasi publik. Kebijakan publik merupakan instrument nyata yang menggambarkan hubungan riil antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut W.I.Jenkins (dalam Wahab, 2017:15) merumuskan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari pada aktor tersebut.

William N.Dunn (dalam Psalong, Harbani, 2017:47) mengatakan bahwa kebijakan public adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Thomas R.Dye (dalam Psalong, Harbani, 2017:47) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Ia mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan

satu kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Chaizi Nasucha (dalam Psalong, Harbani, 2017:47) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Jenis-jenis kebijakan publik menurut Nugroho (dalam Psalong, Harbani, 2017:47), sebagai berikut:

1. Kebijakan yang bersifat Makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum.
2. Kebijakan yang bersifat Meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti Kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Wali Kota.
3. Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh Aparat Negara di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Kebijakan publik merupakan suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan saling terkait, yang dilakukan oleh pemerintah dengan stakeholder dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik, dan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan publik.

2.1.2.1 Formulasi kebijakan

Tjokroamidjojo mengatakan bahwa *folicy formulation* sama dengan pembentukan kebijakan merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan secara terus menerus dan tidak pernah selesai, dalam hal ini didalamnya termasuk pembuatan keputusan. Lebih jauh tentang proses pembuatan kebijakan negara atau publik (Hendrawati 2017) .

Perumusan kebijakan adalah jabaran dari pada perumusan masalah yang dijadwalkan dalam agenda kebijakan. Perumusan masalah memiliki tujuan dalam mengembangkan perencanaan, metode, bahan yang dalam hal ini berusaha untuk mencegah suatu permasalahan, dalam perumusan kebijakan kebutuhan, dan tindakan penyelesaian masalah publik. Perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan peraturan yang akan diusulkan, perintah eksekutif, atau aturan administrasi (Suprpto 2023).

Menurut Dunn perumusan kebijakan publik adalah mengembangkan panduan terhadap pilihan-pilihan yang akan diambil untuk pemecahan masalah. Winarno juga mengemukakan perumusan kebijakan publik adalah setiap pemilihan alternatif memiliki strategi dalam pemecahan masalah (Suprpto 2023)

Menurut Anderson, mengatakan perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana alternatif disepakati untuk masalah- masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses yang terdiri dari empat tahap yakni: pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, pengenalan masalah.

Proses perumusan kebijakan meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan sejumlah informasi selengkap mungkin
- b. Merumuskan berbagai alternatif dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya
- c. Menggalang kesatuan pendapat dan koalisi diantara berbagai individu
- d. Mendiskusikan, melakukan tawar-menawar dan kompromi untuk menghasilkan suatu kesepakatan.

Pengembangan metode formulasi kebijakan merupakan tahap awal dari kegiatan pembuatan kebijakan yang melibatkan tidak hanya pihak pemerintahan tapi juga lembaga lain di luar pemerintahan sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan formulasi kebijakan sebagai inti dari proses pembuatan kebijakan publik yang mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan yang relevan dan teruji itu, akan menghasilkan alternative-alternative kebijakan yang mengarah pada pemecahan masalah-masalah publik yang tercantum dalam agenda pemerintahan.

Menurut Jones dalam (Suprpto 2023) ada beberapa langkah-langkah untuk menempuh alternatif pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi masalah yaitu pemerintah memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan publik dengan mengelompokkan atau mengklarifikasikan permasalahan yang menjadi latar belakang perumusan kebijakan publik.
2. Merumuskan tujuan dan menyusun dalam jenjang tertentu yaitu perumusan kebijakan mempunyai tujuan yang jelas.

3. Mengidentifikasi semua alternatif kebijaksanaan yaitu setiap instansi mengelompokkan semua alternatif yang ada untuk dapat digunakan dalam memecahan masalah.
4. Meramalkan atau memperedisikan akibat-akibat dari tiap- tiap alternatif yaitu mempredisikan akibat-akibat dari identifikasi yang digunakan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi.
5. Membandingkan setiap akibat dengan selalu mengacu pada tujuan yaitu setelah beberapa alternatif yang tersusun berjenjang sesuai dengan dengan tingkat resiko penilaian yang terbaik untuk digunakan.
6. Memilih alternatif terbaik yaitu permasalahan yang terjadi dapat diamati dan prediksi akibat munculnya sebuah kebijakan.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ciri dari perumusan kebijakan publik dalam perumusan kebijakan dilakukan analisis dari semua aspek terhadap isu atau masalah yang muncul dan dilakukan pengujian terhadap setiap alternatif terbaik yang akan digunakan dalam pengambilan kebijakan.

2.1.2.2 Implementasi kebijakan

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan kebutuhan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi dapat diartikan sebagai penerapan sesuatu yang telah dirancang atau dibuat secara matang, sehingga pengerjaannya dapat dilakukan dengan penuh keyakinan dan tujuan yang jelas.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: “Implementasi kebijakan dipandang sebagai alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Jaharuddin 2024).

Pada awalnya, studi terkait implementasi kebijakan dipandang kurang penting oleh para ahli karena dianggap sebatas pelaksanaan terkait apa yang tertulis dalam kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Namun pada praktiknya, kegiatan implementasi tidak sesederhana yang dibayangkan. Menurut Eugene Bardach (1977) dalam bukunya yang berjudul *The Implementation Game* berpendapat bahwa aksi penerapan kebijakan tidak mudah dalam pelaksanaan. Suatu rumusan kebijakan yang sudah dirancang seideal mungkin dengan menyesuaikan permasalahan yang ada akan mengalami kesulitan dalam realisasinya demi memuaskan target kebijakan publik (Kasmad, 2013).

Menurut Wahab lazimnya resiko gagal terhadap suatu kebijakan disebabkan oleh faktor pelaksanaan yang buruk (*bad execution*), kebijakan yang buruk (*bad policy*) dan nasib yang tidak beruntung (*bad luck*) (Hiplunudin, 2017).

Menurut Saefullah potensi kegagalan kebijakan terletak pada perbedaan antara kebijakan dan kemampuan pelaksanaan itu sendiri. Terdapat dua faktor antara lain : 1) perumus kebijakan kurang memahami kondisi di lapangan, 2) informasi yang digunakan tidak mengalami pembaharuan. Kelemahan lainnya timbul dari faktor lemahnya birokrasi pemerintah yang timbul dari rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki. Lemahnya sumber daya manusia pada birokrat berpengaruh pada bagaimana kemampuan mereka dalam melaksanakan kebijakan publik di lapangan (Hiplunudin, 2017).

Pemaparan diatas dapat menunjukkan bahwa implementasi tidak hanya tahap realisasi dari peraturan yang telah ditetapkan namun juga termasuk dinamika-dinamika di dalamnya baik pihak pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, keputusan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan belum tentu menjamin kelancaran pada proses implementasi. Karena itulah implementasi tidak bisa dipandang sepele dalam proses kebijakan publik (Hiplunudin, 2017).

Model –model implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1) Model Van Horn dan Van Meter

Model ini merupakan model dengan pendekatan top-down pertama dalam sejarah perkembangan model implementasi kebijakan generasi kedua. Model ini diperkenalkan oleh Donald van Meter dan Carl van Horn (1975) dalam tulisan yang berjudul “*The Policy Implementation Process*” dalam jurnal yang berjudul “*Administration and Society*”. Model ini dikembangkan dari model pendahulunya, Pressman dan Wildavsky yang

sebelumnya memelopori kajian implementasi kebijakan pada generasi pertama (Kasmad, 2013).

Terdapat 6 variabel dalam model Van Horn dan Van Meter. Sekilas model ini terlihat mirip dengan model dari Edwards III, namun yang menjadi pembeda adalah model Van Meter dan Van Horn memiliki penegasan akan pentingnya unsur kondisi sosial, ekonomi dan politik dari eksternal serta identifikasi tujuan kebijakan dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi (Kasmad, 2013).

Berikut adalah beberapa model yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Komunikasi dan Penegakan
5. Disposisi
6. Kondisi ekonomi

2) Model George C Edward III

Edwards III mengartikan implementasi sebagai tahapan yang terdapat diantara penyusunan kebijakan dan hasil dari kebijakan tersebut. Bagi Edwards III, masalah utama implementasi kebijakan adalah terletak pada perhatian pada implementasi kebijakan.

Model Edwards III dikategorikan sebagai model top-down karena fokus utama dari model ini adalah kinerja dari badan pelaksana yang

berdasarkan atas keputusan pemerintah pusat. Terdapat empat variabel dalam model ini : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Variabel komunikasi dan sumber daya merupakan dampak langsung sedangkan disposisi dan struktur organisasi merupakan dampak tidak langsung (Kasmad, 2013).

a) Komunikasi

Komunikasi kebijakan publik adalah proses penyampaian pesan, program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. komunikasi kebijakan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dipahami dan tersampaikan secara utuh kepada publik. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target grup*) sehingga akan mengurangi distribusi implementasi.

b) Sumberdaya

Sumber daya merupakan aset yang dapat digunakan dalam implementasi, sumberdaya dapat berupa keuangan, material, layanan, dan staf. Ketika kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. sumberdaya dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

c) Disposisi

Disposisi adalah water atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Prosedur* atau *SOP*). *SOP* menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

3.) Model Warwic Warwic mengatakan bahwa: “Dalam Implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Kemampuan organisasi; dalam tahap ini, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah dibebankan atau ditetapkan pada suatu organisasi. Kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu: (i) kemampuan teknis, (ii) kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar

instansi yang terkait, dan (iii) meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan "SOPs" (Standard Operating Prosedures), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Informasi; kurangnya informasi dari para aktor terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi yang kurang antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan.
3. Dukungan; kurang kesediaan objek-objek kebijakan "terikat" kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.
4. Pembagian potensi, pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian Implementasi Kebijakan Kemampuan Dukungan Organisasi Informasi Pembagian Potensi 72 tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

4.) Jan Merse mengemukakan bahwa: "Model Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) informasi,
- 2) isi Kebijakan,
- 3) Dukungan Masyarakat (fisik dan non fisik)
- 4) Pembagian potensi. Khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program".Penegasan Jan Merse sebagaimana pada ilustrasi gambar diatas

menunjukkan bahwa setiap implementasi kebijakan tetap membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai stakeholder. Oleh karena pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap implementasi kebijakan program pembangunan dan kemasyarakatan.

5.) Model Mazmanian dan Sabatier model yang ditawarkan oleh Danial Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) yang menegaskan bahwa : “Implementasi kebijakan adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan”. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yakni:

1. variabel independen; mudah tidaknya masalah dikendalikan berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan yang dikehendaki.
2. variabel intervening; kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber daya dan dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan implementor kebijakan serta keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.

3. variabel dependen; tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu: i) pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, ii) kepatuhan obyek, iii) hasil nyata, iv) penerimaan atas hasil nyata, dan akhirnya mengarah kepada 57 v) revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

2.1.2.3 Evaluasi Kebijakan Publik.

Evaluasi ini merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target kebijakan yang ditentukan. Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah penilaian terhadap serangkaian tindakan yang telah direncanakan, diputuskan, dan dilakukan; dimana tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai pertimbangan dalam peninjauan dan peningkatan pelaksanaan kebijakan pada masa yang akan datang (Pramono 2020).

Menurut nugroho sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan (Mustari 2015)..

Menurut Subarsono Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu aktifitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai

perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisisnya.

Evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melihat hasil (*outcomes*) atau dampak (*impacts*), akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan. Dengan kata lain, evaluasi dapat pula digunakan untuk melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis/pelaksanaan (*guide lines*) yang telah ditentukan (Mustari 2015).

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan menilai suatu kebijakan publik yang dilaksanakan dengan memperhatikan dampak negatif dan positif dari suatu kebijakan dilaksanakan. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan ssuatu kebijakan. Evaluasi kebijakan tidak hanya menilai hasil dan dampak tetapi juga menilai bagaimana proses pelaksanaan, bagaimana jalannya suatu kebijakan apakah telah sesuai dengan yang telah ditentukan atau tidak dengan tujuan tidak adanya penyelewengan dan penyalahgunaan kebijakan.

Menurut Weiss unsur-unsur penting yg terkandung dalam evaluasi kebijakan adalah :

- a. Untuk mengukur dampak dengan bertumpu pada riset yang digunakan.
- b. Dampak tadi menekankan pada suatu hasil dari efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan- aturan atau standar.

- c. Perbandingan antara dampak (effects) dengan tujuan (goals) menekankan pada penggunaan kriteria yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilakukan dengan baik.
- d. Memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial.

Selanjutnya Dunn menjelaskan sejumlah fungsi utama evaluasi dalam analisis kebijakan, yakni :

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode- metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Sedangkan menurut Wibawa evaluasi mempunyai 4 fungsi, yaitu

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standard dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan memberi arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

- a) Efektifitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
- b) Efisiensi (*efficiency*), berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari nilai moneterinya.
- c) Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

- d) Kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran untuk mendistribusikan resources dalam masyarakat.
- e) Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan
- f) Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut

2.1.3 Teori Katahanan Pangan

Hak atas pangan merupakan bagian penting dari hak asasi manusia karena pangan merupakan kebutuhan pokok dan penting bagi kehidupan manusia. Semua orang tahu bahwa makanan adalah kebutuhan pokok setiap makhluk hidup.

Menurut Nurul Asiah (2020), manusia selalu membutuhkan makanan. Menurut Undang-undang No.18 Tahun 2012 pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan atau minuman, termasuk bahan tambahan, bahan baku, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan minuman.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, pasal 1 menjelaskan pangan sebagai segala yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia. Ini termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiap makanan.

Ketahanan pangan telah menjadi isu sentral dalam kerangka pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia sehingga pangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional (Ariani, 2002). Ketahanan pangan adalah masalah kompleks yang diartikan sebagai keadaan dimana individu pada setiap saat memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk memenuhi pola makan dan preferensi makanan untuk hidup sehat dan aktif (Kenneth Ayuurebobi Ae-Ngibise, 2021).

Adapun ketahanan pangan tingkat regional merupakan syarat keharusan bagi ketahanan pangan tingkat komunitas lokal tetapi tidak cukup menjamin ketahanan pangan tingkat nasional tidak cukup menjamin terwujudnya ketahanan pangan bagi semua orang, untuk mencukupi kebutuhan pangan agar hidup sehat dan produktif.(Saliem & Ariani, 2016).

Kebijakan pangan merupakan kebijakan yang paling strategi yang merupakan kebutuhan primer manusia. Untuk itu dalam menghadapi tantangan dan permasalahan agar tercapainya ketahanan pangan berkelanjutan, yang perlu adanya penyesuaian atau perubahan arah kebijakan yang saat ini diimplementasikan. Perubahan pendekatan arah kebijakan ini disarankan dengan cara penetapan tujuan, cara, serta sasaran pembangunan ketahanan pangan, kebijakan pembangunan pangan ini diarahkan pada pemantapan ketahanan pangan untuk menjamin penyediaan pangan yang adil dan merata di tingkat masyarakat, rumah tangga dan perorangan yang sesuai dengan kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan gizi. (Chaireni et al., 2020)

Berikut disajikan beberapa definisi ketahanan pangan yang sering diacu (Iranita Haryono, 2020).

Berdasarkan definisi tersebut bahwa ketahanan pangan memiliki lima unsur yang harus dipenuhi :

- a. Berorientasi pada rumah tangga dan individu.
- b. Dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses.
- c. Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan sosial.

- d. Berorientasi pada pemenuhan gizi.
- e. Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130 Tahun 2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, yang dimaksud pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang penyediaan dan penyalurannya mendapat bantuan dari pemerintah yaitu subsidi untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. Sebagai barang dalam pengawasan, pupuk bersubsidi diatur oleh beberapa peraturan baik melalui peraturan presiden maupun melalui peraturan menteri. Diantaranya melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penentuan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Pengawasan Junto Peraturan Presiden Nomor: 15 Tahun 2011. Prinsip ketahanan pangan Menurut undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan mendefinisikan:

1. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
2. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan

manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

3. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
4. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Indikator untuk menentukan ketahanan pangan tergantung pada keadaan di daerah tersebut. Untuk mengevaluasi ketahanan pangan, diperlukan beberapa indikator. Dalam menilai ketahanan pangan, sebaiknya tidak menggunakan indikator yang hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi termasuk konsumsi budaya dan perilaku sehari-hari (Ariani, 2002). Salah satu dari banyak subsistem ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan status gizi yang dihasilkan dari ketahanan pangan (Rustanti, 2016). Semua subsistem ini harus dipenuhi karena jika salah satunya tidak dipenuhi, maka tidak mungkin dianggap tahan terhadap pangan. Sistem ketahanan pangan di Indonesia terdiri dari (1) jumlah dan jenis pangan yang cukup untuk masyarakat, (2) distribusi pangan yang merata bagi semua orang, dan (3) konsumsi pangan dengan nilai gizi yang seimbang, sehingga status gizi masyarakat terpenuhi (Rustanti, 2016).

Menurut FAO (*food and agriculture organization*) serta dipakai dalam badan pangan nasional Beberapa aspek yaitu:

a. Aspek Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan merupakan suatu kondisi di mana tersedianya pangan yang dapat dihasilkan melalui produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta impor pangan apabila kedua sumber utama belum dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan daerah. Ketersediaan pangan dipengaruhi oleh jumlah produksi di suatu daerah, perdagangan pangan melalui mekanisme pasar, persediaan yang dimiliki pedagang dan cadangan pemerintah, serta bantuan pangan dari pemerintah atau lembaga lainnya.

Salah satu aspek ketersediaan pangan adalah jumlah produksi bahan pangan serealialia yang mengandung karbohidrat sebagai sumber energi, seperti beras, jagung, ubi, gandum, dan ketela. Ketersediaan pangan yang cukup diartikan bahwa jumlah makanan yang dibutuhkan masyarakat dapat dipenuhi (Sumarsono dkk, 2017). Makanan tersebut harus tersedia dalam jumlah yang cukup, aman dikonsumsi, bergizi, dan mampu memenuhi kebutuhan kalori setiap orang (Rustanti, 2016).

Produksi pangan adalah hasil dari tanah sendiri, sedangkan ketersediaan adalah memenuhi kebutuhan bahan pangan yang diperoleh dari sumber lain daripada produksi sendiri. Menurut Atlas Keamanan dan Risiko Pangan (FSVA), rasio konsumsi normatif per kapita digunakan untuk menghitung ketersediaan pangan.

b. Aspek Akses Pangan

Menurut Rustanti (2016), aspek akses pangan adalah kemampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka baik melalui produksi sendiri, pembelian, atau bantuan. Kemampuan daya beli untuk bahan pangan bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi aspek akses terhadap pangan. Akses makanan terdiri dari tiga: akses fisik dan akses yang terkait dengan sarana untuk proses distribusi. Aspek ekonomi yang berkaitan dengan penghasilan masyarakat, jumlah lapangan pekerjaan, dan harga, dan aspek akses sosial yang berkaitan dengan preferensi makanan.

c. Aspek Pemanfaatan Pangan (Penyerapan Pangan)

Penyerapan pangan adalah hasil dari keadaan ketahanan pangan nasional. Kesehatan masyarakat dan status gizi terkait dengan penggunaan atau penyerapan pangan. Salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat pemanfaatan pangan ketahanan terhadap makanan. Rustanti (2016) menyatakan bahwa konsumsi makanan untuk kehidupan yang lebih sehat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, ketersediaan air, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan kesehatan balita.

2.1.3.1 Kebijakan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan masalah yang sangat kompleks, karena ia memiliki banyak actor yang terlibat dalam proses penentuan dan implementasi kebijakan ketahanan pangan. Selain itu, ia juga berkaitan dengan aspek kehidupan manusia seperti aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan merupakan *wicked problem* yang tidak

memungkinkan dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri melalui kebijakan public melainkan menuntut keterlibatan semua pemangku kepentingan.

Program-program public untuk menyelesaikan masalah pemenuhan kebutuhan public, seperti program ketahanan pangan merupakan *collaborative* program yang dijadikan solusi terhadap masalah-masalah public, tersebut. Namun, program tersebut tidak mampu mencapai kinerja kebijakan dengan efektif karena para actor atau pemangku kepentingan yang terlibat tidak mendapatkan stimulus dari pemerintah berupa *policy instrument* yang mampu mengubah perilaku mereka ke arah pencapaian kinerja kebijakan.

Hal ini dapat ditunjukkan pada kinerja kebijakan ketahanan pangan di Indonesia, yaitu hingga triwulan III-2016 Indonesia telah mendatangkan 1,1 juta ton beras (sebagai bahan pangan utama) dari luar negeri dengan nilai mencapai US\$ 472,5 juta. Sementara pada periode yang sama tahun lalu jumlahnya hanya 229,6 ribu ton dengan nilai US\$ 99,8 juta. Dalam hal ini impor beras mengalami kenaikan 46 persen yang pada umumnya dari Thailand, Vietnam dan Pakistan (laporan kinerja ketahanan pangan, 2016).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan gizi, serta regulasi-regulasi lainnya yang juga diperkuat dengan tatanan konsep internasional melalui Food Agriculture Organization (FAO) merupakan landasan program pembangunan Ketahanan Pangan baik di tingkat Nasional, Provinsi, ataupun Kabupaten / Kota. Terwujudnya Ketahanan Pangan merupakan hasil interaksi dari semua sistem atau komponen ketersediaan pangan, distribusi pangan dan

konsumsi pangan. Subsistem ketersediaan antara ekspor dan import. Ketersediaan Pangan harus dikelola sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, serta stabilnya penyediaannya dari waktu ke waktu. Subsistem distribusi pangan mencakup aspek aksesibilitas secara fisik dan ekonomi atas pangan secara merata. Hal ini bukan hanya berarti pangan tersedia disemua lokasi yang membutuhkan, tetapi juga menyangkut keterjangkauan dari segi ekonomi yang dicerminkan oleh harga dan daya beli masyarakat. Subsistem konsumsi mencakup upaya peningkatan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, gizi dan kesehatan yang baik sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal. Konsumsi pangan hendaknya memperhatikan kebutuhan pangan/gizi bagi setiap individu. Dalam subsistem konsumsi terdapat aspek penting lain yaitu aspek diversifikasi pangan. Aspek ini merupakan suatu cara untuk memperoleh keragaman konsumsi zat gizi, sekaligus melepaskan ketergantungan masyarakat atas satu jenis pangan pokok tertentu yaitu beras.

Pengadaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk serta sesuai dengan persyaratan gizi selalu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan dan merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah manusia. Pertanyaan yang timbul “apakah produksi pangan akan mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan karena penambahan penduduk”. Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan informasi mengenai situasi pangan di suatu daerah pada periode tertentu yang dapat disiapkan dengan tepat, teliti dan mudah di pahami serta sekaligus dapat mengetahui gambaran mengenai produksi, pengadaan. dan penggunaan pangan, serta tingkat konsumsi penduduk per kapita.

Penyediaan pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman, baik secara kuantitas maupun kualitas, merupakan fondasi yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Kekurangan pangan berpotensi memicu keresahan berdampak pada social, keamanan, dan ekonomi. Besarnya penyediaan pangan suatu daerah, baik yang berasal dari produksi domestik maupun impor, adalah suatu ukuran yang mencerminkan cukup tidaknya suplai pangan di daerah yang bersangkutan. Seperti kita maklumi, pangan sebagai sumber zat gizi bagi makhluk hidup umumnya dan manusia khususnya, merupakan kebutuhan pokok yang harus dikonsumsi setiap hari. Kedudukan pangan bagi masyarakat dapat di pandang sebagai salah satu komoditas yang strategis karena erat kaitannya dengan masalah Ketahanan Nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, pangan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Ini termasuk bahan tambahan, bahan baku, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Disebutkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan memberikan keuntungan yang adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan.

Kondisi di mana makanan tersedia dalam jumlah dan kualitas yang cukup bagi negara dan individu secara keseluruhan dikenal sebagai ketahanan pangan.

Kondisi ini ditunjukkan dengan fakta bahwa makanan tersedia dalam jumlah dan kualitas yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, dan tidak bertentangan dengan budaya, agama, atau kepercayaan masyarakat, sehingga orang dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dengan demikian, beras tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok. Oleh karena itu, Perpres No 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal mendorong pengembangan berbagai sumber pangan, termasuk karbohidrat non-beras dan non-terigu. Menurut Keputusan Menteri Pertanian No 64 tahun 2017, pengembangan pokok lokal dimaksudkan untuk mempercepat diversifikasi pangan dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

2.1.3.2 Ketahanan Pangan Di Kabupaten Kuantan Singingi

Ketahanan pangan merupakan salah satu bagian pembangunan hampir di semua negara termasuk di Indonesia, sehingga baik pemerintah pusat maupun daerah menempatkan program ketahanan pangan suatu kebutuhan yang sangat penting dan bersifat urusan wajib. Penyelenggaraan pangan dilakukan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.

Ketahanan pangan terdiri dari empat aspek utama yaitu: ketersediaan (*food availability*), akses pangan (*food acces*), penyerapan pangan (*food utilization*) dan stabilitas pangan (*food stability*). Stabilitas pangan dalam suatu masyarakat akan terbentuk apabila ketiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan penyerapan pangan mampu terwujud dan terintegrasi dengan baik.

Hal ini berarti konsep ketahanan pangan tidak hanya mencakup ketersediaan pangan yang memadai saja, melainkan juga oleh faktor akses dan penyerapan pangan (dewi, dian chintya 2023).

Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau dengan jumlah penduduk mencapai 339.890 jiwa pada tahun 2021. Jumlah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022) pertumbuhan penduduk pada tahun 2020-2021 sebesar 1,46%. Peningkatan penduduk setiap tahunnya akan mempengaruhi ketahanan pangan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, dewasa ini Kabupaten Kuantan Singingi sudah mampu memproduksi tanaman pangan dan palawija seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau.

Produksi tanaman pangan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi harus ditingkatkan setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Akan tetapi selama dua terakhir (2020-2021) produksi beberapa tanaman pangan seperti padi, ubi kayu, ubi jalar dan kacang hijau justru mengalami penurunan.

Berdasarkan data produksi, tanaman padi mengalami penurunan sebesar 30% dari 26.707,40 ton pada tahun 2020 menjadi 18.694,82 ton pada tahun 2021. Selain tanaman padi yang menjadi sumber pangan utama masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi beberapa tanaman palawija seperti ubi kayu (menurun 17,05%), ubi jalar (menurun 60,02%) dan kacang hijau (37,14%). Apabila kondisi ini terus berlanjut, akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Kuantan Singingi. Anggoro menyatakan keterbatasan pangan di suatu daerah, berpengaruh

terhadap fluktuatif harga pangan sehingga menyumbang inflasi. Arsanti juga berpendapat bahwa, kelangkaan agriculture input, penurunan produksi terutama perishable product (produksi pangan pokok relatif stabil), berpengaruh pada penurunan kualitas dan kuantitas pangan.

Diketahui bahwa Kabupaten Kuantan Singingi berada pada kondisi defisit pangan. Peningkatan produksi dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan memaksimalkan penggunaan dan pengelolaan lahan pertanian, sehingga kebutuhan pangan dapat tercukupi dan tercipta kemandirian pangan

2.1.3.3 Ketahanan Pangan Di Desa Rawang Binjai

Program ketahanan pangan di rancang oleh pemerintahan pusat dan diteruskan kepada pemerintahan daerah yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintahan desa, yang mana pemerintahan desa menjadi pelaksana utama dalam program ketahanan pangan tersebut. Sehingga pemerintahan desa yang mengetahui potensi, dan hambatan pada program ketahanan pangan yang berada pada desanya sendiri.

Desa rawang binjai adalah desa yang ada di kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi yang mayoritas lahan yang ada di desa rawang binjai adalah lahan persawahan penanaman padi. Setiap warga desa disana memiliki lahan untuk menanam padi hal ini membuat mayoritas penduduk desa berprofesi sebagai petani padi. Selain petani padi, beberapa penduduk desa juga memiliki lahan perkebunan dan perikanan. Hal ini menjadikan desa rawang binjai menjadi desa yang sangat berpotensi mempunyai ketahanan pangan yang stabil.

Berdasarkan rata-rata lahan yang ada di desa rawang binjai adalah persawahan, hal ini membuat penduduk desa memiliki ketahanan pangan yang cukup mandiri dimana dapat dilihat dari mayoritas penduduk desa rawang binjai memiliki pekerjaan sebagai petani padi sehingga mereka memiliki stok atau cadangan pangan untuk bahan pokok.

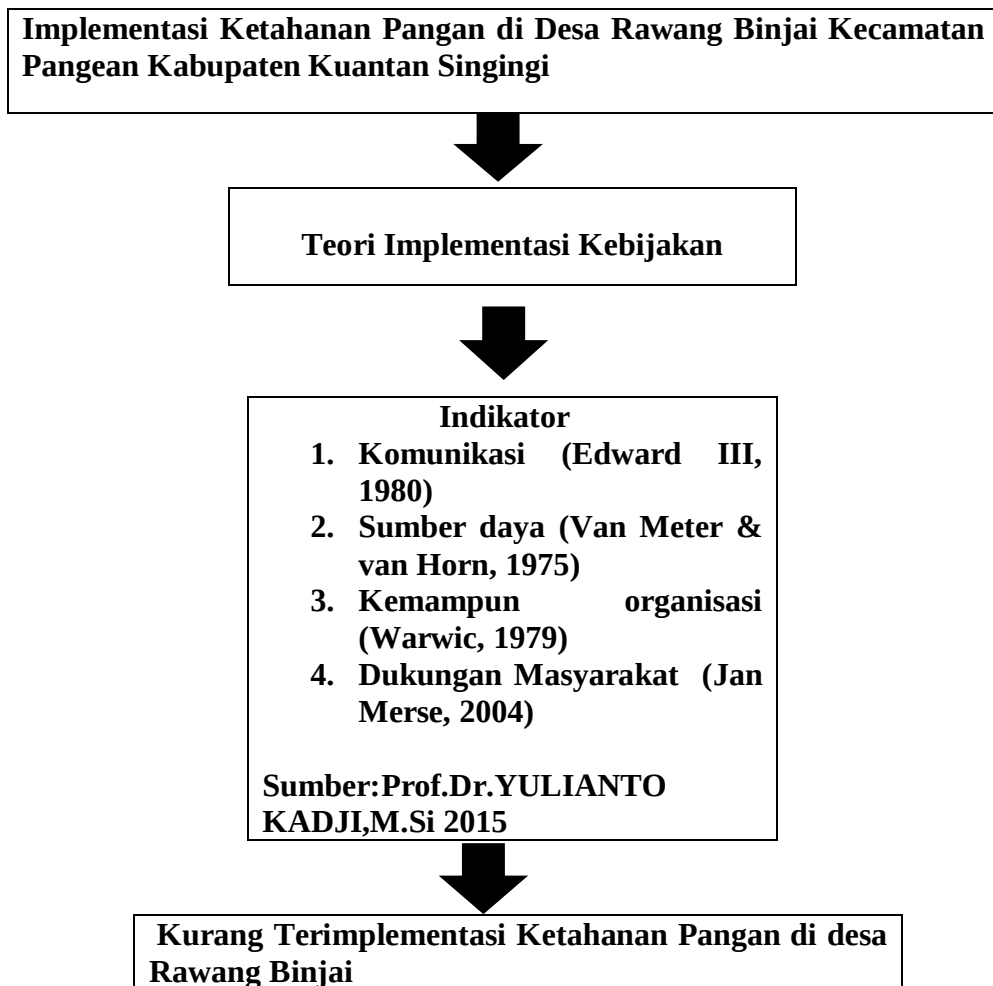
Tetapi penanaman padi tidak terprogram dengan baik oleh pemerintah sehingga data pendapatan setiap panen padi tidak dapat diketahui. Sedangkan dalam penanaman jagung pipil pemerintah desa baru menjalankan program tersebut dalam tahun ini dan belum memasuki masa panen.

2.1 Tabel Indikator Implementasi Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Van Meter & Van Horn (1975)	Edward III (1980)	Warwic (1979)	Jan merse (2004)
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 2. Sumber daya 3. Karakteristik agen Pelaksana 4. Komunikasi dan Penegakan 5. Disposisi 6. Kondisi ekonomi	1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Sikap Pelaksana 4. Struktur birokrasi	1. Kemampuan organisasi 2. Informasi 3. Dukungan 4. Pembagian potensi	1. Informasi 2. Isu kebijakan 3. Dukungan Masyarakat 4. Pembagian potensi

2.2 Kerangka Pemikiran

Tabel 2.1 : Kerangka Pemikiran Implementasi Ketahanan Pangan Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi



2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya ditulis dalam bentuk pernyataan dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris pengumpulan data.

Berdasarkan dari perumusan masalah di atas maka hipotesis yang dibuat adalah : Implementasi Ketahanan Pangan di Desa Rawang Binjai telah berjalan, namun masih menghadapi kendala.

2.4 Operasional Variabel Penelitian

Tabel 2.2 : Konsep Operasional Variabel Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
Implementasi Progran Ketahanan Pangan Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi	Komunikasi	1. Kejelasan Informasi 2. Konsistensi Informasi	Ordinal
	Sumber Daya	1. SDM 2. Anggaran	Ordinal
	Kemampuan Organisasi	1. Tugas Struktur Orgaanisasi 2. Pemahaman Pelaksana	Ordinal
	Dukungan Masyarakat	1. Partisipasi 2. Respon Masyarakat	Ordinal

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah survei, dengan tingkat eksplanasi deskriptif dan analisa data kualitatif. Survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang di ambil dari populasi tersebut. Sehingga dikemukakan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan anatar variabel. (Sugiyono, 2016:7)

Deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. (Sugiyono, 2016:11)

Kualitatif adalah penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. (Sugiyono, 2016:15)

3.2 Informan

Informan merupakan orang yang dianggap dan bersedia untuk membeerikan data dan keterangan kepada peneliti, yakni seseorang atau sekelompok orang yang memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan objek penelitian.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Program ketahanan pangan Di desa rawang Binjai kecamatan pangean kabupaten

kuantan singingi.dengan informannya adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, ketua BPD, pendamping desa, petani jagung pipil, pengurus bumdes.

Tabel 3.1 : Informan Penelitian Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Informan	Jumlah	Persentase
1	Kepala Desa Rawang Binjai	1	100%
2	Sekretaris Desa Rawang Binjai	1	100%
3	Ketua BPD Desa Rawang Binjai	1	100%
4	Petani Jagung pipil Desa Rawang Binjai	5	100%
5	Pendamping Desa rawang Binjai	1	100%
6	Ketua Bumdes Desa rawang Binjai	1	100%
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Olahan Penulis tahun 2025

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2016:80) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data ke peneliti. Data Primer adalah data yang merujuk kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pertama kali. Jenis data ini disusun dan dikumpulkan secara khusus untuk tujuan penelitian atau analisis tertentu.

3.3.2 Data sekunder

Data sekunder adalah pengelolaan data primer dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. (Sugiyono, 2016:84).

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Impelementasi Ketahanan pangan Desa di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

3.5 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Desa Rawang Binjai Jln. Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. 29561

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian kualitatif juga dapat dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.6.1 Observasi

Peneliti menggunakan observasi, suatu teknik pengumpulan data, untuk mengamati dan mencatat suatu peristiwa secara langsung. Peneliti biasanya dapat berpartisipasi atau mengamati objek yang ditelitinya (Rosady R., 2010).

3.6.2 Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa informan yang diambil dari sampel Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Wawancara merupakan cara komunikasi antara dua orang yang bertujuan untuk mengetahui lebih banyak tentang orang lain melalui pertanyaan yang disusun dengan cara yang sesuai untuk wawancara (Dedy M., 2008). Wawancara dapat dilakukan secara *Face-to-Face* atau secara langsung serta dapat juga dilakukan secara tidak langsung yakni melalui perantara seperti Hanphone. Dalam penelitian ini, lima informan (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa ,

Staf Desa, dan Ketua BPD) diwawancarai sesuai dengan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti. Informan yang diwawancarai juga memberi jawaban secara lisan saat berbicara.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi metode pengumpulan data sebagai dokumen penting untuk penelitian, seperti catatan, informasi arsip, dan dokumen lain yang berkaitan dengan subjek penelitian (Masyuri dan Zainuddin). Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi dari dokumen yang ada sebelum mengumpulkan catatan yang berkaitan dengan penelitian, seperti catatan, foto, dan dokumentasi elektronik, serta informasi lain yang tidak diperoleh dari observasi dan wawancara.

3.7 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif menurut konsep Miles dan Hiberman.

Menurut Miles dan Hiberman, proses analisis data kualitatif, yang mencakup reduksi, penyajian, dan peringkasan data, dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga akhir. Dalam penelitian ini, data dianalisis dalam beberapa tahap, seperti:

3.7.1 Reduksi Data (*Data reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih pertanyaan-pertanyaan kunci, memfokuskan pada topik-topik penting yang relevan dengan penelitian, dan mencari pola topik. Pada akhirnya, ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan proses pengumpulan data yang lebih lanjut.

Reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh pada saat dilapangan. Maka peneliti perlu menyederhanakan data yang didapat pada saat dilapangan dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan penelitian.

3.7.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian informasi adalah suatu organisasi informasi yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan penelitian. Peneliti dapat memahami apa yang terjadi secara keseluruhan dengan melihat penyajian data.

Dalam program Jagung pipil di Desa Rawang binjai, Target hasil panen pada lahan seluas 1 hektar ditetapkan sebesar 2 ton. Namun, pada realitasnya hasil panen yang diperoleh hanya mencapai 400 kilogram, hal ini menunjukkan bahwa capaian hasil panen masih jauh dari target yang diharapkan. Dengan demikian, hasil panen yang dicapai baru sebesar 20% dari target, sehingga terdapat selisih kekurangan sebesar 80% yang perlu menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program ketahanan pangan. Program Ketahanan pangan ini menggunakan dana sebesar Rp. 94.000.000. Setelah masa panen, hasil yang diperoleh hanya sebanyak 400 kilogram jagung pipil dengan total pendapatan sebesar Rp.6.000.000 dari perhitungan tersebut terlihat bahwa dana yang dikeluarkan jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima, sehingga program penanaman jagung pipil ini mengalami kerugian yang cukup signifikan.

Dari 4 Indikator : Komunikasi, Sumber daya, Kemampuan Organisasi, dan dukungan masyarakat.

1. Maka Indikator Sumber Daya hasilnya dikategorikan sangat Baik. Karena Dilihat dari sisi Sumber daya seperti lahan sudah terpenuhi, dilihat dari lahan yang ada 1 hektar yang menghasilkan semestinya secara maksimal apa bila berhasil maka hasilnya mencapai 2 sampai 3 ton sekali panen, tetapi pada kenyataannya hanya 400 kilogram yang berhasil panen. kemudian dari segi sumber daya Uang, modal yang dikucurkan semestinya menghasilkan 2 atau 3 kali lipat dari dana yang digunakan, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Lalu dari segi Sumber daya mesinnya ketersediaan alat dan teknologi sudah memadai. Kemudian dari sumber daya manusianya juga sudah terpenuhi, tetapi anggota yang sudah dipekerjakan tidak melakukan pelatihan atau penyuluhan maka dari itu mereka tidak mampu untuk menghasilkan pendapatan sesuai yang diharapkan.
2. Maka Indikator Komunikasi hasilnya dikategorikan Sangat baik. Dilihat dari sisi kejelasan informasi yang disampaikan oleh Aparat desa dan anggota Bumdes kepada petani jagung pipil sudah terpenuhi dan tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di antara petani, sehingga pelaksanaan penanaman dilakukan secara seragam. kemudian media komunikasi yang digunakan untuk penyampaian informasi berupa Alat tradisional canang dan melakukan rapat atau musyawarah desa mengenai penjelasan tentang pelaksanaan program.

3. Maka Indikator kemampuan Organisasi hasilnya dikategorikan Sangat Baik. Dilihat dari sisi kemampuan organisasi seperti tugas antar anggota sudah terpenuhi, dalam pelaksanaan program jagung pipil kepala desa menerapkan sistem pengorganisasian yang jelas melalui pembagian tugas antar anggota. contohnya ketua Bumdes mengkoordinasikan seluruh kegiatan, sekretaris mengelolah administrasi dan pencatatan, serta bendahara mengatur keuangan. dengan adanya pembagian tugas ini setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.
4. Maka Indikator Dukungan Masyarakat hasilnya dikategorikan Kurang Baik. Dilihat dari sisi dukungan masyarakat, seperti sudah memberikan kawasan untuk penanaman jagung pipil, dan sebagian masyarakat juga berpartisipasi langsung untuk menanam jagung pipil. Namun dari segi Partisipasi masyarakat masih tergolong rendah dan masih belum terpenuhi.

3.7.3 Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Saat mengumpulkan data, peneliti harus memahami pentingnya apa yang mereka temukan saat merekam. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan. Ini menunjukkan bahwa peneliti dapat membuat kesimpulan berdasarkan temuan lapangan, tetapi kesimpulan harus didukung dengan bukti atau instrumen yang dapat dipercaya.

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel 3.2 : Jadwal penelitian tentang Implementasi program Ketahanan Pangan Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2024/2025															
		Oktober				Nov/Des				Januari				Feb/maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan judul																
s2.	Pembuatan proposal																
3.	Bimbingan Proposal																
4.	Ujian Proposal																
5.	Revisi proposal																
6.	Bimbingan Skripsi																
7.	Ujian Skripsi																
8.	Revisi Skripsi																

Sumber: Modifikasi Peneliti Tahun 2026

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Desa Rawang Binjai

Pangean merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Kantor kecamatan ini terletak di dusun Penghijauan, Pasar Baru Pangean. Kawasan ini terdiri dari 17 Desa dan 55 Dusun dan 87 RT. Salah satu hal yang tak bisa dipisahkan dengan Pangean adalah “Silat Pangean” yang merupakan sebuah seni bela diri yang lahir dan di populerkan secara turun temurun oleh guru-guru besar silat pangean yang dikenal dengan Induak Barompek. Secara umum silat pangian dapat dikelompokkan atas, Silek Tangan (silat tangan kosong), Silek Podang (silat dengan menggunakan senjata pedang), dan Silek Parisai (silat yang menggunakan senjata pedang dan perisai).

Desa Rawang Binjai dahulunya pertama kali di temukan oleh Datuk Serang yang sedang berlayar mencari ikan menggunakan Perahu. Desa Rawang Binjai terdiri dari banyak Rawa-Rawa dan sebuah Pohon Binjai yang masih ada sampai sekarang dahulunya akses ke desa menggunakan perahu dan akses menuju ke kecamatan sangat sulit. Desa Rawang Binjai merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Selanjutnya jarak dari Kecamatan Pangean Ke Provinsi 168 Km dengan waktu 4 jam kendaraan bermotor, Jarak tempuh ke kabupaten kota 32 Km dengan waktu 45 menit perjalanan dan dari Desa ke Kecamatan 7 Km dengan jangka waktu 15 menit. Kecamatan Pangean memiliki luas wilayah sebesar 145,32 Km yang terdiri dari yang terdiri dari 17 Desa.

4.2 Keadaan Demografi Desa Rawang Binjai

4.2.1 Batas Wilayah Desa

Batas Desa Rawang Binjai merupakan salah satu dari 17 Desa yang ada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Letak Geografis Desa Rawang Binjai, terletak diantara

4.2.1.1 Sebelah Utara : Desa Sako Pangean

4.2.1.2 Sebelah Selatan : Desa Pulau Inggau

4.2.1.3 Sebelah Barat : Desa Beringin Jaya

4.2.1.4 Sebelah Timur : Desa Pauh Angit

4.2.2 Luas Wilayah Desa

4.2.2.1 Pemukiman : 53 Ha

4.2.2.2 Pertanian Sawah : 63 Ha

4.2.2.3 Ladang/tegalan : 0 Ha

4.2.2.4 Perkebunan : 80 Ha

4.2.2.5 Hutan : 0 Ha

4.2.2.6 Rawa-rawa : 0 Ha

4.2.2.7 Perkantoran : 0,25 Ha

4.2.2.8 Sekolah : 1,5 Ha

4.2.2.9 Jalan : 15 Km

4.2.2.10 Lapangan Bola : 1 Ha

4.2.3 Orbitasi

4.2.3.1 Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 7 Km

4.2.3.2 Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit

4.2.3.3 Jarak ke ibu kota Kabupaten : 32 Km

4.2.3.4 Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 45 Menit

4.2.4 Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jumlah penduduk menurut Data pe tahun 2024 adalah 525 jiwa dengan jumlah KK (Kartu Keluarga) sebanyak 157 KK. Untuk mengetahui jumlah penduduk dan jenis kelamin penduduk Desa Rawang Binjai di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.1: Jumlah Penduduk dan jenis kelamin di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	284 Jiwa
2	Perempuan	241 Jiwa
Jumlah		525 Jiwa

Sumber: Kantor Kepala Desa Rawang Binjai 2026

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebanyak 525 jiwa. Dengan penduduk laki-laki berjumlah 284 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 241 jiwa.

4.2.4 Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Rawang Binjai bermata pencaharian yang tidak tetap sebagian besar penduduk Desa Rawang Binjai bermata pencaharian petani daan peternak, selanjutnya bekerja sebagai pedagang, PNS, Tukang, Guru, Swasta,Pensiunan.

Tabel 4.2 : Komposisi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	350
2	Pedagang	6
3	PNS	6
4	Tukang	15
5	Guru	10
6	Swasta	12
7	Peternak	62
8	Pensiunan	1
Jumlah		462

Sumber: Kantor Kepala Desa Rawang Binjai, 2026

4.3 Visi dan Misi Desa Rawang Binjai

4.3.1 Visi Desa Rawang Binjai terwujudnya Desa Rawang Binjai sebagai desa

yang mandiri berbasis Pertanian Perkebunan dan Perikanan untuk mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera.

4.3.2 Misi Desa Rawang Binjai untuk mencapai tujuan visi diatas maka Desa

Rawang Binjai menyusun misi sebagai agar visi dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Adapun misi dari Desa Rawang Binjai adalah sebagai berikut :

- 4.3.1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur
- 4.3.2 Menampung aspirasi masyarakat
- 4.3.3 Mengelolah aspirasi masyarakat
- 4.3.4 Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan
- 4.3.5 Meningkatkan pembangunan di bidang perikanan
- 4.3.6 Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan
- 4.3.7 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

- 4.3.8 Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan guna meningkatkan perekonomian

4.4 Struktur Organisasi

Desa Rawang Binjai yang terletak di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau memiliki struktur pemerintahan desa yang umumnya terdiri dari beberapa posisi kunci. Berikut adalah struktur organisasi desa Rawang Binjai:

4.4.1 Kepala Desa

Pemimpin tertinggi di desa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa

4.4.2 Sekretaris Desa

Membantu Kepala Desa dalam administrasi dan manajemen pemerintahan desa

4.4.3 Kepala Urusan (Kaur)

4.4.3.1 Kaur Pemerintahan

Mengurus administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat

4.4.3.2 Kaur Pembangunan

Bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa

4.4.3.3 Kaur Keuangan

Yang mengelolah keuangan dan anggaran desa

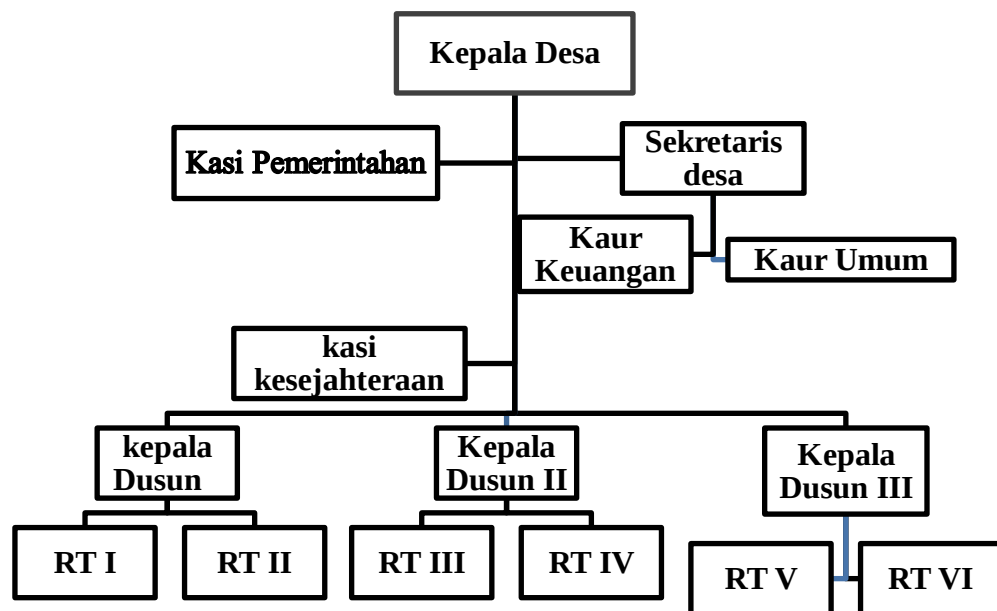
4.4.4 Kepala Dusun

Pemimpin di tingkat dusun yang mengkoordinasikan kegiatan di wilayahnya

4.4.5 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja Kepala Desa.

Tabel 4.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rawang Binjai



4.5 Fasilitas Umum Desa Rawang Binjai

Fasilitas umum yang tersedia di Desa Rawang Binjai sebagai berikut:

4.5.1 Balai Desa	: 1 Unit
4.5.2 Mejid	: 1 Unit
4.5.3 Mushollah	: 2 Unit
4.5.4 Puskesmas	: 1 Unit
4.5.5 Sekolah Dasar	: 1 Unit
4.5.6 Gedung MDTA	: 1 Unit

4.5.7 Gedung TK/ PAUD : 1 Unit

4.5.8 Kantor Kepala Desa : 1 Unit

4.6 Struktur Organisasi Desa Rawang Binjai

Desa Rawang Binjai memiliki kondisi sosial yang cukup baik, tingkat kemiskinan di Desa Rawang Binjai tidak terlalu tinggi, hal ini dapat dilihat dari kondisi rumah masyarakat Desa Rawang Binjai yang sebagian besar sudah merupakan rumah yang permanen. Status Desa Rawang Binjai masih termasuk desa yang berkembang, dimana sebagian besar masyarakat memiliki pekerjaan sebagai petani dan peternak. Masyarakat hidup dari hasil pertanian dan peternakan dan memiliki kegiatan sosial yang kuat seperti gotong royong dan kerja bakti. Hubungan antar kelompok sosial juga harmonis serta memiliki penyelesaian konflik yang efektif seperti penyelesaian konflik secara kekeluargaan.

Dibandingkan dengan desa sumber daya manusia di Desa Rawang Binjai masih tergolong rendah yang mana masih banyak masyarakat yang bertamatan sekolah SD, SMP, SLTA, serta hanya beberapa yang mengenyam pendidikan sampai pada tatan Sarjana/ Strata 1.

Kondisi kesehatan masyarakat Desa Rawang Binjai relatif tinggi hal ini didukung dengan rutinya posyandu balita dan posyandu lansia yang dilaksanakan satu kali dalam sebulan. Seta pemenuhan air bersih di Desa Rawang Binjai menggunakan air PAM yang dikelola oleh desa. Masyarakat Desa Rawang Binjai beragama islam, terdapat kelompok pengajian yang berjumlah 3 kelompok dengan jumlah anggotamasing-masing kelompok 10-35 orang.

Masyarakat Desa Rawang Binjai masih mempertahankan adat istiadat seperti dengan adanya suku di Desa Rawang Binjai yaitu suku Paliang, Camin, Pintu Gobang, dan Melayu, adat tersebut melarang untuk nikah satu suku. Kemudian dalam acara kebudayaan Desa Rawang Binjai masih mempertahankan budaya seperti mando,a padang sebelum turun menanam padi di sawah serta tradisi adat pernikahan seperti sisampek, maantar anak pancar, ba induak bako, dan tomat kaji. Dalam kesenian Desa Rawang Binjai masih kental dengan tradisi tarian randai dan pacu jalur. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Desa Rawang Binjai adalah Bahasa lokal dngan beberapa warga yang juga menggunakan Bahasa Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaen Kuantan Singingi ” Kurang Terimplementasikan”. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya partisipasi dari masyarakat dalam mengikuti program, kemampuan organisasi pelaksana yang belum melakukan perencanaan dengan matang,keterbatasan sumber daya serta rendahnya pengetahuan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan program belum dapat tercapai secara maksimal dan pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.

6.2 Saran

Berdasarkan Penlitan yang peneliti lakukan adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan dari kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepala desa serta perangkat desa lebih aktif dalam memberikan pelatihan atau penyuluhan kepada masyarakat,sehingga masyarakat dapat memahami tujuan,manfaat,serta tata cara pelaksanaan program secara lebih baik.
2. Diharapkan kepala desa serta perangkat desa dapat memanfaatkan media komunikasi yang lebih efektif,seperti membentuk grup whatsapp,agar informasi terkait dapat tersampaikan dengan cepat.

3. Diharapkan kepala desa serta perangkat desa lebih meningkatkan upaya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam program ketahanan pangan.
4. Diharapkan kepada kepala desa serta perangkat desa dapat mempertimbangkan pemilihan jenis tanaman yang lebih sesuai dengan kondisi lahan, kebutuhan lahan, dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadian, I. L. H. A. M. "Produktivitas budidaya sistem mina padi untuk meningkatkan ketahanan pangan." *Jurnal Akuatek* 2.1 (2021): 1-6.
- Alfia, L. (2016). *Implementasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan*
- Amal, Ikhlasul, and Muhammad Nuh. 2023. "Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa Di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga Tahun 2019." *Spektrum* 20(2): 79.
- Anggara (2012;20) Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- aulida, Rizki. *Aplikasi pengolahan data ketahanan pangan berbasis web pada dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten ogan ilir*. Diss. Politeknik negeri sriwijaya, 2018.
- Badan Pangan Nasional. (2024). *Perkembangan Konsumsi Pangan Nasional dan Provinsi Tahun 2019-2023*
- Chaireni, D., dkk. (2020). *Analisis Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan*. *Jurnal Kebijakan Pangan*..
- deewi, dian chintya, sisca vaulina. 2023. "Ketahanan Pangan Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau: Berdasarkan Aspek Ketersediaan Pangan." *Jurnal Nasional UNS* 7(1): 1175–84
- Dunn, W. N. (2017). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edwards, G. C. III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Erwan, A. & Ratih, H. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Fayol, H. (1949). *General and industrial management* (C. Storrs, Trans.). London, UK: Pitman Publishing.
- Hendrawati. 2017. "Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo)." *Jurnal Akuntansi* 11.
- Iranita Haryono. (2020). *Konsep Ketahanan Pangan* (Review Literatur). Jakarta
- Kenneth Ayuurebobi Ae-Ngibise. (2021). *Food Security and Community Nutrition*. *Journal of Food Systems*
- Khalista, R., & Risni, N. (2019). *Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Indonesia*. *Jurnal Ketahanan Pangan*.
- Kusumanegara, A. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kadji Yulianto(2008) *model implementasi kebijakan*.

Laswell, H. & Kaplan, A. (dalam Subarsono, 2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lombu, Badurani. "Peranan pemerintahan desa terhadap pengawasan dan pembinaan badan usaha milik desa (Bumdes) di Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo." *Jurnal Governance Opinion* 8.1 (2023): 1-9.

Mulyadi,Deddy.2016.*studi kebijakan publik dan pelayanan publik*.bandung: Alfabeta

Mustari, Nuryanti. 2015. "Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik)." *Kebijakan Publik Deliberatif* 1: 286.

Nakamura, R., & Smallwood, F. (dalam Safi'i, 2009). *Policy Implementation*. New York: Free Press.

Nogi, Y. (2013). *Konsep Implementasi Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.

Nurul Asiah. (2020). *Hak Atas Pangan sebagai Hak Asasi Manusia*. Jurnal Sosial Humaniora.pada Dinas Pertanian Kabupaten Blitar). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*.

Pasolong, H. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

Pramono, Joko. 2020. *Kebijakan Publik Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*.

Ravyansah, dkk. 2022. *Kebijakan Publik Kebijakan Publik*. Cetakan Pe. ed. Ariyanto. Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Sularmo & Jauhari. (2014). *Mina Padi dan Peningkatan Pendapatan Petani*. Jurnal Agrikultura

Sumarsono, S. dkk. (2017). *Analisis Ketersediaan Pangan dalam Sistem Ketahanan Pangan Daerah*. Jurnal Ketahanan Pangan.

Suri, D. M. (2017). *Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru*. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.

Suryana, Achmad. "Menelisik ketahanan pangan, kebijakan pangan, dan swasembada beras." *Pengembangan Inovasi Pertanian* 1.1 (20016): 1-16.

Suprpto, T. (2023). *Perumusan kebijakan publik: Konsep, proses, dan pendekatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Suprpto, Anis Ribcalia Septiana. 2023. *Kebijakan Publi:Teori,Formulasi Dan Aplikasi*.

Suryana, Achmad. 20017. *Menelisik Ketahanan Pangan, Kebijakan Pangan, dan Swasembada Beras*. *Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian: Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional*, Volume I Nomor I, pp. 15-20. Bogor: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012

Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 perbaruan dari Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012.

Van meter,Donald S&Van Horn,Carl E.(1975)"The policy Implementation Process:A Conceptual Framework"

Wahab, S. A. (2017). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik* (Edisi Revisi). Bumi Aksara

Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus* (Revisi ed.). Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).

.Warwick,Donal P (1979) *Integrating Planning and implementation : A Transactional Approach*.

.

.

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

**Judul: Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Rawang Binjai
Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**

**Kepada: Kepala Desa, Sekretaris desa, Ketua BPD, Pendamping Desa, dan
Pengurus Bumdes Desa Rawang Binjai**

A. Identitas Peneliti

Nama	: Putri Anjeli
NPM	: 220411066
Program Studi	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial
Universitas	: Islam Kuantan Singingi
Jenjang	: S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

Nama
Jenis Kelamin
Tingkat Pendidikan
Usia
Jabatan/Pekerjaan :
Masa Kerja
Alamat

C. Petunjuk

- a. Daftar pertanyaan ini hanya dimaksudkan untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapa pun dan dimaksudkan untuk syarat pengumpulan data informasi yang berhubungan dengan penulisan penelitian ilmiah.
- b. Hasil wawancara dalam penelitian di harapkan dapat bermanfaat dari berbagai pihak-pihak yang terkait terutama penulis.
- c. Identitas Bapak / Ibu / Saudara / i dijamin kerahasiaannya.

D. Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian Tentang Implementasi Program Ketahanan Pangan Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

a. Komunikasi Terkait Program ketahanan Pangan Desa Rawang Binjai

1. Bagaimana menurut Bapak/ibu tentang Kejelasan Informasi ketahanan pangan di Desa Rawang Binjai ?
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu Tentang Konsistensinya Informasi Dalam Program Ketahanan Pangan Di Desa Rawang Binjai?

b. Sumber Daya yang mendukung dalam melaksanakan Program Ketahanan Pangan Di Desa Rawang Binjai

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang Sumber Daya Manusia dalam Program ketahanan pangan di Desa RRawang Binjai?
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai Berapa Total anggaran yang di kururkan dalam program ketahanan pangan jagung pipil di Desa Rawang Binjai?

c. Kemampuan Organisasi Dalam Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Di Desa Rawang Binjai

1. Siapa menurut Bapak/Ibu Yang terlibat dalam struktur organisasi pada Program Ketahanan Pangan di Desa Rawang Bnjai ?
2. .Bagaimana menurut Bapak/Ibu Tentang Pemahaman Pelaksana Dalam Program jagung Pipil?

d. Dukungan Masyarakat dalam Ikut serta mengenai Program Ketahanan Pangan Di Desa Rawang Binjai

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Ketahanan Pangan Di Desa Rawang Binjai?
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang Respon Masyarakat Dalam Program Ketahanan Pangan Jagung Pipil Di Desa Rawang Binjai?

Teluk Kuantan, 13 Januari 2026
Informan

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Judul: Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Rawang Binjai
Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Kepada: Masyarakat Desa rawang Binjai.

A. Identitas Peneliti

Nama	: Putri Anjeli
NPM	: 220411066
Program Studi	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial
Universitas	: Islam Kuantan Singingi
Jenjang	: S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden Nomor **informen :**

1. Kepala desa (informen 1)
2. Sekretaris Desa (informen 2)
3. Ketua BPD (informen 3)
4. Pendamping Desa (informen 4)
5. Ketua Bumdes (informen 5)
6. Masyarakat (informen 6)
7. Masyarakat (informen 7)
8. Masyarakat (informen 8)
9. Masyarakat (informen 9)
10. Masyarakat (informen 10)

Nama	
Jenis Kelamin	:
Tingkat Pendidikan	
Usia	
Jabatan/Pekerjaan	
Masa Kerja	
Alamat	

C. Petunjuk

- a. Daftar pertanyaan ini hanya dimaksudkan untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapa pun dan dimaksudkan untuk syarat pengumpulan data informasi yang berhubungan dengan penulisan penelitian ilmiah.
- b. Hasil wawancara dalam penelitian di harapkan dapat bermanfaat dari berbagai pihak-pihak yang terkait terutama penulis.
- c. Identitas Bapak / Ibu / Saudara / i dijamin kerahasiaannya.

D. Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian Tentang Implementasi Program Ketahanan Pangan Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

a. Komunikasi Terkait Program ketahanan Pangan Desa Rawang Binjai

1. Bagaimana Keterlibatan Bapak/Ibu Dalam Program Ketahanan Pangan Jagung Pipil di Desa Rawang Binjai?
2. Seberapa Banyak Informasi Yang Bapak/Ibu Pahami Tentang Program ketahanan Pangan Jagung Pipil?

b. Sumber Daya yang mendukung dalam melaksanakan Program Ketahanan Pangan Di Desa Rawang Binjai

1. Apakah ada Penyuluhan Atau Pelatihan Terkait Ketahanan Pangan Jagung Pipil Kepada Masyarakat?
2. Dari mana sumber dana yang digunakan dalam Ketahanan Pangan Jagung Pipil?

c. Kemampuan Organisasi Dalam Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Desa Rawang Binjai

1. Bagaimana menurut bapak /ibu kemampuan Pengurus bumdes dan aparat desa dalam mengelolah Program ketahanan pangan jagung pipil?
2. Bagaimana Proses pengambilan keputusan daalam kegiatan penanaman jagung pipil di desa rawang binjai?

d. Dukungan Masyarakat dalam ikut serta mengenai Program Ketahanan Pangan Di Desa Rawang Binjai

1. Dalam bentuk apa saja dukungan yang pernah atau bersedia bapak/ibu berikan terhadap penanaman jagung pipil di desa rawang binjai?

KRP P O

2. Seberapa aktif Bapak/ibu tentang program ketahanan pangan jagung pipil yang dilaksanakan di desa rawang binjai?

Teluk Kuantan, 13 Januari 2026
Inform



Wawancara bersama Kepala Desa Rawang Binjai



Wawancara Bersama Ketua BPD Rawang Binjai



Wawancara Bersama Ketua Bumdes Rawang Binjai



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail: unikskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 04/Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Memperhatikan :** Berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menunjuk :

- a. Pembimbing I : Desriadi, S.Sos., M.Si
NIDN : 1022018302
- b. Pembimbing II : Sahri Muharam, S.Sos., M.Si
NIDN : 1021117906

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Putri Anjeli
 NPM : 220411066
 Judul Skripsi : Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
 PADA TANGGAL : 11 Agustus 2025



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Administrasi Negara
2. Mahasiswa
3. Arsip



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Form 11

Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Putri Anjeli
 NPM : 220411066
 Program Studi : Administrasi Negara
 Judul : Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Rawang Binjai Kec.
 Pangean Kab. Kuantan Singingi

Hari/Tgl Ujian : Kamis/ 21 Mei 2026

Dinyatakan sudah melakukan Revisi atas Skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Anggota 1	3.
4.	Sarjan M, S.Sos.,M.Si	Anggota 2	4.
5.	Risvandi, S.Pd.I., M.Si	Anggota 3	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN PANGEAN
KANTOR KEPALA DESA RAWANG BINJAI

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : ⁶7Z/SKP/RB/IV/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **PUTRI ANJELI**
 NIM : 220411066
 Jurusan : Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi.

Jenjang Pendidikan: S (Starata 1)

Alamat : Rawang Binjai

Judul Penelitian : "IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DESA RAWANG BINJAI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI."

Dengan ini kami menjelaskan bahwa saudara/i **PUTRI ANJELI** Selaku Mahasiswa Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS), Benar telah melakukan penelitian Di Desa Rawang Binjai, Kecamatan Pangean dengan Judul Penelitian "**IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DESA RAWANG BINJAI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**"

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya, **atas** perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan Di : Rawang Binjai
 Kepala Desa Rawang Binjai
Pada Tanggal 19 April 2026



CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Anjeli
 NPM : 220411066
 Judul : Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Rawang Binjai
 Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Pembimbing 1 : Desriadi, S.Sos., M.Si

Pembimbing 2 : Sahri Muharam, S.Sos., M.Si

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
	31-3-2026	Tahun diganti 2026 Tabel diperkecil + sumber			
		jawab informen 1stasi tambah kan observasi.			
		di tiap indikator.			
		Analisis para ahli			
		Teori dalam bahasan di indikator			
	08-4-2026	Rata kiri rata kanan BAB 6 Tambahkan observasi, Dokumentasi			
		Definisi			
	14-4-2026	Margin, Tambahkan pengantar di setiap sub indikator.			
		LAMPIRAN, BIODATA Surat Pernyataan skripsi.			

		Kata pengantar - kata Persembahan		➤	
		Moto Sk Bimbingan			
		Daftar wawancara Abstrak-			
		- surat persetujuan foto Dokumentasi			
21/4-26		Daftar alat ukur	↳		
		hasil peneliti			
		- Berikan hasil	±		
		peneliti			
21/4-26		Surat Keterangan			,
		Dari Desa			
		Agus & A			
28/4-26		are uji skn			



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas jake Telp.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Putri Anjeli

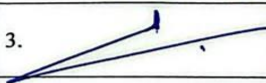
NPM : 220411066

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Rawang Binjai Kecamatan
Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Hari/Tgl Ujian : Senin / 22 Desember 2025

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1. 
2.	Alsar Andri, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2. 
3.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3. 
4.	Sahri Muharam S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4. 

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Form 11

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Putri Anjeli
NPM : 220411066
Program Studi : Administrasi Negara
Judul : Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Rawang Binjai Kec.
Pangean Kab. Kuantan Singingi

Hari/1gl Ujian : Kamis/ 21 Mei 2026

Dinyatakan sudah melakukan Revisi atas Skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Anggota 1	3.
4.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Anggota 2	4.
5.	Risvandi, S.Pd.I., M.Si	Anggota 3	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Putri Anjeli
Tempat/Tanggal Lahir : Rawang Binjai/13 mei 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum menikah
Kebangsaan :Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat :Rawang Binjai
Alamat Email : putrianjeli2@gmail.com
Pendidikan : 1. Tahun 2015 LULUS SD Negeri 006 Rawang binjai
2. Tahun 2018 LULUS MTSN 1 Kuantan singingi
3. Tahun 2021 LULUS SMAN 1 Benai

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 29 April 2026

Penulis

PUTRI ANJELI
NPM.220411066